

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan pungutan yang wajib diberikan pada negara oleh orang pribadi maupun badan atau perusahaan berdasarkan undang - undang yang akan digunakan untuk kepentingan negara dan kesejahteraan masyarakat umum dalam pengawasan pajak dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Sehubungan dengan telah diterbitkan ketentuan terkait dengan proses validasi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat Wajib Pajak terdaftar terhadap Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan yang disampaikan Wajib Pajak sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-29/PJ/2014 tentang Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan Surat Pemberitahuan Tahunan dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-43/PJ/2014 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan Surat Pemberitahuan Tahunan, perlu disusun petunjuk pelaksanaan proses validasi NPWP yang dilakukan oleh KPP. Untuk mengelola keuangan dengan baik, seorang pengusaha harus melakukan pencatatan dan pembukuan keuangan di dalam perusahaannya. Pencatatan dan pembukuan yang baik akan mempengaruhi keberhasilan dalam bisnis yang dijalankan. Setiap perusahaan membutuhkan sistem pencatatan yang mencatat dan merekam semua aktivitas perusahaan secara rapi dan teratur. Secara umum, sistem pencatatan aktivitas suatu usaha dinamakan akuntansi, yaitu suatu sistem informasi yang menghasilkan laporan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan. Dengan demikian, pemimpin perusahaan dan pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengambil berbagai alternatif kebijakan untuk kelangsungan hidup perusahaan. Pembukuan yang disusun secara rapi dan teratur dapat menghasilkan informasi mengenai pajak yang terutang atas jumlah seluruh objek pajak yang diterima, diperoleh, diserahkan dan dilakukan selama masa pajak (bulanan/tahunan) tertentu. Dengan demikian, pembukuan atau akuntansi dapat memudahkan wajib pajak untuk melaksanakan hak dan kewajiban

perpajakannya, antara lain mempermudah wajib pajak dalam mengisi Surat Pemberitahuan Masa dan Tahunan, mempermudah perhitungan besarnya Penghasilan Kena Pajak (Dasar Pengenaan Pajak untuk PPN) dan menyajikan informasi tentang posisi finansial dan hasil usaha untuk dianalisa oleh pengambil kebijakan perusahaan.

Kebijakan perusahaan sangat mengutamakan serta pelayanan yang prima dalam memenuhi harapan, kebutuhan, dan kepuasan hasil manajemen secara berkesinambungan. Hal ini mendorong manajemen untuk melakukan manajemen laba. Aktivitas manajemen laba dilakukan oleh perusahaan besar dan dapat menyebabkan fenomena berupa manipulasi laporan keuangan yang banyak terjadi di dunia, manipulasi tersebut terjadi yang dilakukan manajemen untuk manajemen laba yang menyimpang sehingga menimbulkan pandangan yang buruk terhadap perusahaan dan dapat merugikan pihak-pihak yang berkepentingan.

Menurut Avturizka (2020) bahwa peran pajak di Indonesia semakin penting karena saat ini pajak merupakan primadona bagi pemerintah untuk meningkatkan pendapatannya dalam rangka pembangunan nasional. Sosialisasi pajak yang terus ditingkatkan dari tahun ke tahun, terutama baru-baru ini munculnya kebijakan E-Filing yang memperlihatkan bahwa pemerintah sedang giatnya untuk mensosialisasikan bagaimana pentingnya masyarakat menjadi warga yang taat pajak. Terbitnya Undang-undang Perpajakan No.36 Tahun 2008 menunjukkan bagaimana pemerintah selalu memperbarui tata aturan perpajakan agar sistem perpajakan selalu dapat mengikuti perkembangan bisnis dan ekonomi. Penerimaan pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk pembiayaan pemerintahan dan pembangunan.

Di Indonesia fenomena mengenai manajemen laba terjadi pada beberapa perusahaan besar. Perusahaan manufaktur pertambangan yaitu PT. Delta Dunia Makmur Tbk (DOID) perusahaan yang bergerak di bidang produksi batu bara mengalami penurunan pada tahun 2019. Fenomena ini berawal dari laporan keuangan sepanjang tahun 2019, tercatat ada piutang lainnya yaitu pihak ketiga yang melesat 145,61% dari US\$ 5,3 juta menjadi US\$ 13,1 juta. Masalah dalam nilai penyisihan atas penurunan nilai piutang pihak ketiga hanya naik sebesar 3%.

Manajemen PT. Delta Dunia Makmur (DOID) menyebut, nilai penyisihan tersebut mencerminkan kolektibilitas masing-masing tagihan sehingga serta sejalan dengan peningkatan atas saldo piutang lainnya. Peningkatan pendapatan lain-lain dalam laporan keuangan Delta Dunia Makmur (DOID) 2019 sebesar 96,5% dari US\$ 3,8 juta menjadi US\$ 7,6 juta disebabkan oleh laba selisih kurs sebesar US\$ 6,3 juta dan keuntungan atas penjualan aset tetap, alat berat sebesar US\$ 2 juta. Penjualan aset dalam laporan konsolidasian perusahaan dalam catatan 11 aset tetap dan catatan 27 pendapatan lain-lain adalah sebesar US\$ 138.526 untuk tahun 2019 dan US\$ 2.031.619 untuk tahun 2018. Adapun terkait Covid-19, DOID berusaha menyeimbangkan kapasitas produksi agar dapat melaksanakan bisnis secara efektif dan efisien serta mampu menjaga likuiditas dan efisiensi biaya perusahaan. Laba tersebut adalah hasil penjualan aset tetap yang umumnya sudah selesai masa gunanya sehingga perusahaan tidak dapat lagi menggunakan untuk kegiatan operasional secara efisien dan efektif.

Manajemen laba juga terjadi pada perusahaan manufaktur sub sektor pertambangan yaitu PT. Timah Tbk. Pada tahun 2016, manajemen baru perusahaan menemukan kesalahan pencatatan yang dilakukan manajemen lama dalam laporan keuangan atas diduga memberikan laporan keuangan fiktif pada semester I tahun 2015. Kegiatan laporan keuangan fiktif ini dilakukan guna menutupi kinerja keuangan PT Timah yang terus mengkhawatirkan, kondisi keuangan PT Timah sejak tiga tahun belakangan kurang sehat yang dimulai dari tahun 2013. Ikatan Karyawan Timah (IKT) menilai direksi telah banyak melakukan kebohongan publik melalui media. Perusahaan pada press release laporan keuangan semester I tahun 2015 yang mengatakan bahwa efisiensi dan strategi yang telah telah membuahkan kinerja yang positif. Padahal kenyataannya pada semester I tahun 2015 laba operasi rugi sebesar Rp 59 miliar. Oleh sebab itu, IKT menuntut agar jajaran direksi segera mengundurkan diri. Waktu yang diberikan selama hampir dua tahun oleh IKT tidak berhasil dimanfaatkan oleh jajaran direksi untuk membenahi kinerja perseroan. Selain mengalami penurunan laba, PT Timah juga mencatatkan peningkatan utang hampir 100% dibanding tahun 2013. Pada tahun 2013, utang perseroan hanya mencapai Rp 263 miliar, namun jumlah utang ini meningkat hingga Rp 2,3 triliun pada tahun 2015. Jika

mengacu pada kondisi nyata yang terjadi di PT Timah Tbk, Ali meyakini kalau laporan keuangan semester I 2015 PT Timah (Persero) Tbk yang menyebutkan PT Timah telah berhasil melakukan kegiatan efisiensi dan strategi yang tepat dan membuahkan kinerja positif adalah kebohongan besar. Sebab menurutnya, pada semester I 2015 PT Timah telah mengalami kerugian sebesar Rp 59 milyar.

Fenomena mengenai manajemen laba terjadi pada beberapa perusahaan besar yaitu 18.439 Industri Sudah Kantongi Izin Operasi di Masa Pandemi. Persentase laporan berkalanya 43,84 persen atau 10.281. Dari kegiatan tersebut ada 5.010 IOMKI yang dicabut dan satu dibekukan karena tidak patuh melakukan pelaporan. ”kata Plh Direktur Ketahanan dan Iklim Usaha Industri Kemenperin Iken Retnowulan dikutip dari Antara, Rabu, 06 Juli 2022. Industri dengan IOMKI juga tercatat mampu menyerap 5,65 juta tenaga kerja. Iken menjelaskan IOMKI merupakan salah satu upaya kebijakan yang ditetapkan Kemenperin untuk meningkatkan daya saing industri di tengah pandemi COVID-19. Kebijakan IOMKI ini dianggap menggairahkan iklim usaha di Tanah Air. meskipun 2 tahun kini kita menghadapi COVID-19, nilai PMA Indonesia masih tetap tumbuh meski awalnya kontraksi. Kebijakan IOMKI memiliki empat klasifikasi yakni industri kritikal, industri esensial, industri esensial ekspor + domestik, dan industri non-esensial. Contohnya industri makanan, minuman, petrokimia, semen, dan bahan bangunan. Lebih lanjut Iken menuturkan kinerja sektor industri pengolahan dengan nilai PMI-BI pada triwulan II 2022 mencapai 56,06 persen. Namun industri manufaktur masih menghadapi berbagai tantangan seperti pertumbuhan ekonomi masih terpusat di Pulau Jawa, dampak Free Trade Agreement (FTA) dan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), adanya ketergantungan bahan baku/penolong impor yang tinggi, serta pembiayaan sektor industri yang masih minim. Oleh karenanya sebagai upaya untuk meningkatkan daya saing, Kemenperin menerapkan berbagai kebijakan. Selain IOMKI, Kemenperin bersama kementerian terkait telah menetapkan tarif bea cukai yang menjadi instrumen pengembangan industri dalam peningkatan daya saing. Ada instrumen perdagangan dalam FTA guna menciptakan akses pasar di luar negeri dan menciptakan standarisasi serta meningkatkan investasi asing di dalam negeri, Pada tahun ini terdapat 9 FTA yang bisa dimanfaatkan Indonesia dengan rata-rata

tarif 3,32 persen dan ada yang mencapai 0 persen. Selain itu Kemenperin juga telah menetapkan kebijakan trade remedies yang efektif dalam membendung impor sejenis dan safeguards yang memberikan tenggang waktu bagi industri dalam negeri untuk memperbaiki performa.

Selama empat bulan pertama tahun 2022, kinerja pengapalan produk sektor manufaktur menembus hingga lebih dari USD69,59 miliar atau naik 29,19 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Menperin menegaskan, pihaknya bertekad untuk konsisten melaksanakan program hilirisasi industri yang bertujuan meningkatkan nilai tambah bahan baku dalam negeri, di tengah harga komoditas yang kian menanjak. Sebab, selain memiliki andil dalam tumbuhnya kinerja ekspor nasional, percepatan hilirisasi sektor industri juga berdampak positif pada kesejahteraan rakyat. Tingginya dominasi sektor industri manufaktur pada capaian nilai ekspor nasional juga menstimulasi peningkatan nilai surplus terhadap neraca perdagangan kita saat ini. Merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS), Indonesia kembali mencatatkan surplus neraca perdagangan pada April 2022, yakni sebesar USD7,56 miliar. Apabila dibandingkan dengan bulan sebelumnya, surplus neraca perdagangan pada April naik 66,9 persen. Surplus neraca perdagangan itu diperoleh dari nilai ekspor yang lebih tinggi dibandingkan nilai impor pada periode tersebut. BPS mencatat, nilai ekspor pada April 2022 sebesar USD27,32 miliar, sedangkan nilai impor mencapai USD19,76 miliar. Sementara itu, surplus April 2022 merupakan rekor tertinggi yang berhasil melampaui bulan Oktober 2021 dengan nilai sebesar USD5,74 miliar. Bahkan, nilai ekspor bulan keempat itu juga menjadi capaian tertinggi sepanjang masa, yang sebelumnya tercipta pada Maret 2022 sebesar USD26,5 miliar. Di bulan April 2022, ekspor industri pengolahan mencapai USD19,08 miliar atau naik 27,92% jika dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Tren positif kenaikan ekspor dari sektor industri ini akan kami jaga sebaik mungkin, ditengah-tengah disrupsi rantai supply global karena konflik di Ukraina-Russia. Target kami, kinerja ekspor tahun 2022 bisa melampaui 2021. Menperin menyampaikan, guna terus memacu kinerja ekspor nasional, pemerintah proaktif melakukan berbagai program promosi di kancah internasional serta peningkatan kerja sama bilateral dan multilateral. Momentum ini akan dimanfaatkan melalui kegiatan-kegiatan

pada ajang Presidensi G20 Indonesia. Maka itu, forum G-20 akan dioptimalkan untuk menggali berbagai potensi kerja sama dengan berbagai negara, termasuk di sektor industri. Lebih lanjut, Presidensi G20 dinilai menjadi berkah bagi ekonomi Indonesia. Selain akan menciptakan lapangan kerja melalui kerja sama investasi, event tingkat tinggi tersebut juga berpeluang membuka keran ekspor bagi produk-produk industri kecil dan menengah (IKM).

Perusahaan manufaktur yang terjadi pada manajemen laba tidak hanya kasus diatas ada beberapa perusahaan manufaktur lain, yaitu PT. Energi Mega Persada Tbk yang mengalami penjualan laba menurun pada tahun 2019. Fenomena pertumbuhan fantastis pada kinerja bottom line tersebut bukan dikarenakan peningkatan pemasukan. Pasalnya, pada kuartal I-2019, total pendapatan ENRG berkontraksi 21,22% secara tahunan menjadi US\$ 52,56 juta dari sebelumnya US\$ 66,72 juta di kuartal I-2018. pendapatan perusahaan hingga akhir Maret 2019 turun karena penjualan gas bumi anjlok 35,73% YoY, dari US\$ 64,04 juta menjadi US\$ 41,16 juta. laba perusahaan mampu melesat signifikan dikarenakan jumlah beban keuangan yang mencatatkan penurunan sebesar 50,59% secara tahunan menjadi US\$ 6,36 juta. Total beban keuangan sepanjang 3 bulan pertama tahun ini turun drastis karena biaya bunga pinjaman yang sebelumnya tercatat US\$ 11,77 juta di kuartal I-2018, menjadi hanya US\$ 3,82 juta di kuartal I-2019. Selain beban keuangan, pos lainnya yang turut mengerek peningkatan laba bersih adalah biaya penyusutan, deplesi, dan amortisasi yang membukukan koreksi 61,17% secara tahunan menjadi US\$ 8,47 juta. Di lain pihak, hingga Maret 2019, total aset ENRG tercatat sebesar US\$ 758,74 juta, yang terdiri dari aset lancar senilai US\$ 151,81 juta dan aset tidak lancar senilai US\$ 606,93 juta. Sementara itu, perusahaan membukukan total kewajiban sebesar US\$ 667,35 juta dan total ekuitas mencapai US\$ 91,39 juta.

Fenomena manajemen laba pada perusahaan manufaktur lainnya, yaitu PT. Garda Tujuh Buana Tbk melakukan laba yang terdapat adanya pemalsuan laporan keuangan. Pada tahun 2017, manajemen baru perusahaan menemukan kesalahan pencatatan yang dilakukan manajemen lama karena ada indikasi kecurangan laporan keuangan perseroan periode 2012. Penjualan PT Garda Tujuh Buana Tbk

pada tahun 2013 mengalami anjlok 78,75% menjadi Rp 26,37 miliar dibandingkan penjualan periode sama tahun sebelumnya yang Rp 124,10 miliar. Beban pokok turun menjadi Rp 40,02 miliar dari beban pokok penjualan sebelumnya Rp 61,85 miliar dan rugi kotor diderita sebesar Rp 13,64 miliar dari laba kotor tahun sebelumnya Rp 62,25 miliar. Pendapatan dari selisih kurs diraih sebesar Rp 2,73 miliar, namun beban umum dan administrasi meningkat menjadi Rp7,75 miliar. Rugi sebelum pajak diderita Rp 18,67 miliar pada Maret 2013 dari laba sebelum pajak Rp 58,10 miliar tahun sebelumnya. Sedangkan rugi per saham sebesar Rp 7,47 dari laba bersih per saham sebelumnya Rp 23,24.

Dari beberapa kasus di atas, faktor yang menjadi penyebab kecurangan karena manajemen ingin menutupi kondisi perusahaan yang sebenarnya. Hal ini mungkin saja didorong oleh tekanan untuk menunjukkan kinerja perusahaan yang terlihat baik dengan cara melakukan manipulasi informasi yang diberikan kepada pengguna laporan keuangan. Hal lain yang menjadi pemicu terjadinya kasus tersebut adalah karena tata kelola perusahaan di Indonesia yang lemah. Ketika manajemen gagal dalam mencapai target labanya, maka yang dilakukan manajemen adalah memodifikasi pelaporan keuangan dengan cara mengubah metode akuntansi agar menunjukkan pencapaian laba yang baik serta agar kinerja perusahaan terlihat lebih baik (Cahyadi & Mertha, 2019).

Dalam keadaan persaingan yang ketat sekarang ini, keinginan perusahaan untuk mencapai keuntungan dalam informasi laba yang maksimal secara tepat menjadi kendala, maka berbagai bentuk tindakan yang dilakukan agar memperoleh informasi laba yang dapat diterima dalam perusahaan.

Informasi laba sebagai bagian dari laporan keuangan perusahaan yang sering menjadi target rekayasa melalui tindakan manajemen untuk maksimumkan kepuasannya, tetapi dapat merugikan pemegang saham atau investor. Tindakan manajemen tersebut dapat dilakukan dengan cara memilih kebijakan akuntansi tertentu, sehingga laba perusahaan dapat diatur dengan keinginannya, perilaku manajemen mengatur laba sesuai dengan keinginan tersebut dikenal dengan istilah manajemen laba.

Menurut Lestiani dan Widarjo (2021) bahwa manajemen laba berbasis riil digunakan untuk membuktikan pengaruh efektivitas komite audit dalam meminimalisir praktik manajemen laba yang disebabkan oleh motivasi dalam mendapatkan kompensasi bonus.

Manajemen laba merupakan aktivitas manajerial untuk mempengaruhi laporan keuangan baik dengan cara memanipulasi data atau informasi keuangan perusahaan maupun dengan cara pemilihan metode akuntansi yang diterima dalam prinsip akuntansi bersifat umum, pada akhirnya tujuan untuk memperoleh keuntungan perusahaan.

Perencanaan pajak adalah salah satu cara yang dapat dimanfaatkan oleh wajib pajak dalam melakukan manajemen perpajakan usaha atau penghasilannya, namun perlu diperhatikan bahwa perencanaan pajak yang dimaksud adalah perencanaan pajak tanpa melakukan pelanggaran konstitusi atau Undang - Undang Perpajakan yang berlaku.

Perencanaan pajak adalah merekayasa beban pajak (*tax burden*) dapat ditekan serendah mungkin dengan memanfaatkan peraturan yang ada tetapi berbeda dengan tujuan pembuat undang - undang, maka perencanaan pajak disini sama dengan *tax avoidance* hakikat ekonomis keduanya berusaha untuk memaksimalkan penghasilan setelah pajak (*after tax return*) karena pajak merupakan unsur pengurang laba yang tersedia, baik untuk dibagikan kepada pemegang saham maupun untuk di investasikan kembali.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai perencanaan pajak yang dilakukan oleh Nugroho dan Abbas (2022) menunjukkan bahwa perencanaan pajak memiliki pengaruh positif signifikan terhadap manajemen laba. Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Priscillia (2019) menunjukkan bahwa perencanaan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap manajemen laba. Fitriani, Sofianty dan Halimatusadiah (2020) bahwa perencanaan pajak terbukti berpengaruh signifikan dan positif terhadap manajemen laba. Faqih dan Sulistyowati (2021) penelitian ini menunjukkan bahwa perencanaan pajak tidak memiliki pengaruh terhadap manajemen laba. Sedangkan penelitian yang

dilakukan Lidesano dan Meihendri (2021) menyatakan bahwa perencanaan pajak tidak berpengaruh terhadap manajemen laba.

Faktor yang mempengaruhi manajemen laba riil terhadap asimetri informasi. Asimetri informasi merupakan suatu kondisi dimana satu pihak mempunyai informasi yang lebih baik dari pada pihak lain, sehingga salah satu pihak akan dapat mengambil manfaat dari pihak yang lain.

Asimetri informasi adalah suatu keadaan dimana manajer memiliki akses informasi atas prospek perusahaan yang tidak dimiliki oleh pihak luar perusahaan.

Asimetri informasi merupakan salah satu pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut memiliki keunggulan dan kelebihan informasi mengenai aset yang diperdagangkan dibandingkan dengan pihak lain.

Asimetri informasi dapat mempengaruhi praktik manajemen laba yang dilakukan oleh manajer. Ketika asimetri informasi tinggi, stakeholder tidak memiliki sumber daya yang cukup atas informasi yang relevan dalam memonitor tindakan manajer sehingga akan memunculkan praktik manajemen laba. Akibatnya asimetri informasi ini akan mendorong manajer untuk tidak menyajikan informasi selengkapya. Jika informasi tersebut berkaitan dengan pengukuran kinerja manajer.

Hasil penelitian dari asimetri informasi dilakukan oleh Mahawyahrti dan Budiasih (2016) bahwa asimetri informasi berpengaruh positif terhadap manajemen laba. Veno dan Sasongko (2016) penelitian ini menunjukkan asimetri informasi berpengaruh positif signifikan terhadap manajemen laba. Hidayat, Juanda dan Jati (2019) asimetri informasi tidak berpengaruh negatif signifikan terhadap manajemen laba. Ridwan dan Suryani (2021) menyatakan bahwa asimetri informasi tidak berpengaruh dan signifikan terhadap manajemen laba. TangNgisalu & Jumady (2020) bahwa asimetri informasi berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap manajemen laba.

Beban pajak tangguhan merupakan dapat menambah dan mengurangi jumlah pajak yang harus di bayar dimasa yang akan datang.

Beban pajak tangguhan (*deferred tax expense*) dapat didefinisikan sebagai beban pajak yang dapat berpengaruh pada penambahan atau pengurangan beban pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak di masa yang akan datang. Pada umumnya, beban pajak tangguhan dapat dilihat dari 2 sudut pandang berbeda, yaitu definisi dari sudut pandang akuntansi sebagai akun aset serta definisi dari sudut pandang liabilitas atau utang yang harus dibayar dan dilunasi.

Jika dilihat dari sudut pandang akuntansi sebagai akun aset, pajak tangguhan didefinisikan sebagai jumlah pajak penghasilan yang dipulihkan atau dapat dilakukan perubahan pada periode masa yang akan datang atau masa depan sebagai akibat dari akumulasi rugi pajak yang masih belum dikompensasikan dan belum dimanfaatkannya akumulasi kredit pajak sesuai dengan ketentuan dan peraturan perpajakan yang berlaku. Sedangkan, jika dilihat dari sudut pandang liabilitas atau utang yang harus dibayar dan dilunasi, pajak tangguhan dapat didefinisikan sebagai pajak yang timbul dan terjadi karena adanya perbedaan di antara peraturan perpajakan yaitu fiskal dengan standar akuntansi keuangan yaitu komersial.

Hasil penelitian yang diambil dari beban pajak tangguhan dapat dilakukan oleh Baradja, Basri dan Sasmi (2017) bahwa beban pajak tangguhan berpengaruh positif dan signifikan terhadap manajemen laba. Lestari (2018) bahwa beban pajak tangguhan berpengaruh positif terhadap manajemen laba. Kanji (2019) bahwa beban pajak tangguhan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap manajemen laba. Antonius dan Tampubolon (2019) bahwa beban pajak tangguhan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap manajemen laba. Wijayanti (2016) menyatakan bahwa beban pajak tangguhan tidak berpengaruh terhadap manajemen laba.

Alasan penulis memilih perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) merupakan sebagai objek untuk penelitian, dikarenakan perusahaan manufaktur yang terdiri dari berbagai perusahaan yang salah satunya dapat dijadikan sampel dalam penelitian ini. Alasan lainnya, perusahaan manufaktur merupakan perusahaan yang memiliki produksi yang

berkesinambungan dalam pengelolaan laporan keuangan yang baik dan menarik investor untuk menanamkan modal di perusahaan manufaktur. Hal ini tidak menutup kemungkinan ada manipulasi dalam laporan keuangan yang lebih tinggi dari keadaan yang sebenarnya terjadi.

Berdasarkan fenomena yang terjadi serta bervariasi hasil dari penelitian-penelitian terdahulu, peneliti akan melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Perencanaan Pajak, Asimetri Informasi dan Beban Tangguhan Terhadap Manajemen Laba Riil Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Apakah perencanaan pajak berpengaruh terhadap manajemen laba riil pada perusahaan manufaktur di Indonesia?
2. Apakah asimetri informasi berpengaruh terhadap manajemen laba riil pada perusahaan manufaktur di Indonesia?
3. Apakah beban pajak tangguhan berpengaruh terhadap manajemen laba riil pada perusahaan manufaktur di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan permasalahan diatas, adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaruh perencanaan pajak terhadap manajemen laba riil pada perusahaan manufaktur di Indonesia.
2. Untuk menganalisis pengaruh asimetri informasi terhadap manajemen laba riil pada perusahaan manufaktur di Indonesia.
3. Untuk menganalisis pengaruh beban pajak tangguhan terhadap manajemen laba riil pada perusahaan manufaktur di Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak yang berkepentingan, diantaranya:

1. Bagi Akademisi atau Ilmu Pengetahuan

Bagi pihak akademisi, penelitian ini dapat menggambarkan mengenai pengaruh perencanaan pajak sehingga hasil penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas diri serta memiliki wawasan yang lebih luas.

2. Bagi Profesional

Bagi profesional, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan terutama untuk perusahaan manufaktur untuk melakukan aktivitas perusahaan yang baik agar menghasilkan kualitas informasi yang baik dalam laporan keuangan.

3. Bagi Regulator

Bagi pihak regulator, penelitian ini dapat memperluas wawasan bagi para praktisi dan sekaligus memperoleh pengetahuan empiris akan efektivitas peraturan yang telah dikeluarkan mengenai perencanaan pajak, asimetri informasi, beban pajak tangguhan dan manajemen laba riil dan diharapkan dapat menciptakan peraturan dan ketentuan untuk mengawasi suatu perusahaan yang melakukan praktik tidak sehat.

1.5 Batasan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah diatas, diperoleh gambaran permasalahan yang luas, agar terfokus pada tujuan penelitian maka penulis membatasi masalah penelitian ini, yaitu:

1. Unit analisis dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur manufaktur di Indonesia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
2. Periode penelitian yang digunakan yaitu pada tahun 2016-2021.
3. Variabel independen pada penelitian ini yaitu perencanaan pajak yang diukur dengan *Tax Retention Rate* (Wild et all, 2010).

4. Variabel independen pada penelitian ini yaitu asimetri informasi yang diukur dengan *Bid-Ask Spread* (Healy, 1995).
5. Variabel independen pada penelitian ini yaitu beban pajak tangguhan yang diukur dengan *Deferred Tax Expense*. (Philips et al, 2003)
6. Variabel dependen pada penelitian ini yaitu manajemen laba riil yang diukur dengan arus kas dari aktivitas operasi, biaya produksi dan pengeluaran yang bebas ditentukan (Model Dechow et al., 1998., Roychowdhury, 2006).

1.6 Sistematika Penulisan

Dalam memperoleh gambaran secara umum bagian - bagian yang akan di bahas dalam penelitian, maka penulis menguraikan secara singkat di dalam masing - masing bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan pada bab ini menjelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan batasan masalah serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini menjelaskan tentang landasan teori dalam penulisan skripsi ini, meliputi teori-teori yang menjadi landasan acuan teori yang digunakan dalam menganalisis pada penelitian ini, yang meliputi landasan teori, penelitian terdahulu dan pengembangan hipotesis.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini terdiri dari desain penelitian, tahapan penelitian, variabel, waktu dan tempat penelitian, metode pengambilan sampel serta metode analisis data.

BAB IV PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang gambaran umum objek penelitian, hasil analisis data, dan pembahasan hasil penelitian.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan, keterbatasan penelitian dan implikasi manajerial yang diperlukan dan dapat berguna bagi pihak - pihak yang berkepentingan.



